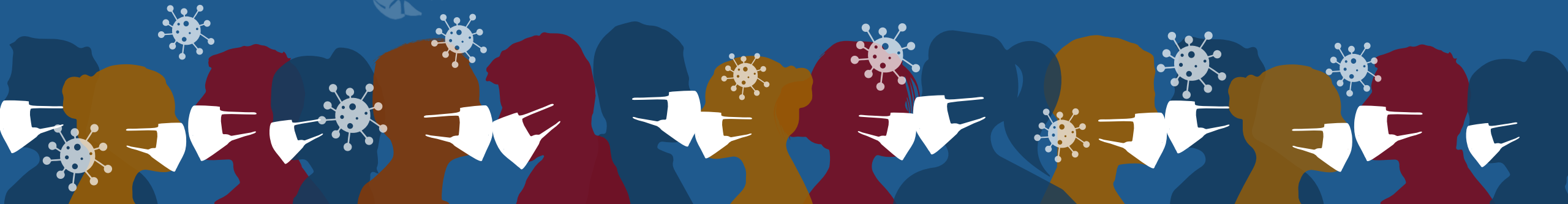




# Pemeriksaan Bidang Kesehatan

Tornanda Syaifullah  
Kepala Auditorat VI.A  
BPK RI



# Sustainable Development Goals



SDGs



#3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia

MDGs

- Goal 1 – Reduce Poverty and Social Exclusion
- Goal 2 – Achieve Universal Primary Education
- Goal 3 - Promote gender equality and empower women
- Goal 4 - Reduce child mortality
- Goal 5 - Improve maternal health
- Goal 6 - Combating HIV/AIDs, malaria, and other diseases
- Goal 7 - Ensure environmental sustainability
- Goal 8 - Develop a global partnership for development

**COVID-19**  
**PANDEMIC**

# SDG. 3d.

Menguatkan kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk **peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global**



## WHO Six Building Block of Health

Enam Pilar Sistem Kesehatan

- SERVICE DELIVERY
- HEALTH WORKFORCE
- INFORMATION
- MEDICAL PRODUCTS, VACCINES & TECHNOLOGIES
- FINANCING
- LEADERSHIP / GOVERNANCE

## Health Security



**Wabah Penyakit**



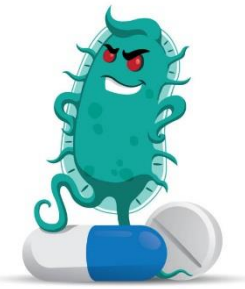
**Kimia Berbahaya**



**Radiasi**



**Biologi**



**Silent Pandemi Resistensi Antimikroba**





COVID-19  
PANDEMI



# KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN  
COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL



## DIFFERENT AUDIT TESTING PROCEDURES





# Dasar Hukum dan Standar Pemeriksaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 : Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 : Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 : Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keu Negara; dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 : Badan Pemeriksa Keuangan.

SPKN



Memberlakukan seluruh kecuali disebutkan lain dalam SPKN

SPAP



PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERIKSAAN KINERJA  
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU





FRAUD adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja terhadap standar/prosedur dan/atau Kode Etik, yang dapat menyebabkan atau telah menyebabkan kerugian

## Unsur-unsur Fraud:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelaku (internal dan eksternal )
- c. Memperoleh keuntungan (pribadi/kelompok)
- d. Dapat menimbulkan kerugian





# Pemahaman Proses Bisnis dan Penilaian Risiko Pada masa Pandemi

- a. **Pemahaman proses bisnis dan profil risiko** K/L, beserta pengendalian internalnya, yang akan digunakan sebagai dasar penentuan luas lingkup pemeriksaan terinci dan prosedur pemeriksaan terinci;
- b. Melakukan **pengujian substantive** diantaranya proses penganggaran realokasi dan refocussing s.d. **pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19**, pengelolaan aset tetap dan persediaan terkait penanganan pandemi COVID-19,, serta transaksi-transaksi siklus pendapatan dan belanja
- c. Melakukan identifikasi **kebijakan akuntansi** dan pelaporan dalam LK, termasuk mengidentifikasi risiko-risiko atas pelaporan dan pertanggungjawaban dampak kebijakan pemerintah atas penanganan **Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**.

Hasil pemutakhiran risiko dan pengendalian internalnya akan digunakan sebagai salah satu dasar **penentuan sifat, luas dan lingkup** serta **penyusunan prosedur** pemeriksaan terinci LK.







## Penilaian Risiko

- Prosedur Alternatif diarahkan pada area/akun dengan risiko salah saji material (sesuai hasil penilaian risiko)

## Analisis Risiko

- Analisis apakah berdampak pervasif, apakah memengaruhi banyak asersi, apakah ada potensi salah saji material, apakah terdapat risiko kecurangan

## Pertimbangan Waktu & Kondisi

- Pertimbangan aspek kesehatan dan keselamatan harus diutamakan, bagi Pemeriksa dan entitas yang diperiksa





## Pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/L

### Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu:

1. Pemeriksaan Belanja (Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penanganan Covid)
2. Pemeriksaan Pinjaman Hutang Luar Negeri

## Pemeriksaan Kinerja Penanganan Covid 19 Pada:

- Kementrian Kesehatan
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- BPJS Kesehatan

## Pemeriksaan Kinerja Program Vaksinasi oleh Pemerintah (Kemenkes dan BPOM)

## Pemeriksaan SDG's 3.D





# Tujuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

- **Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.**
- **Penilaian atas Asersi Manajemen, terdiri dari: eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan penyajian dan pengungkapan**

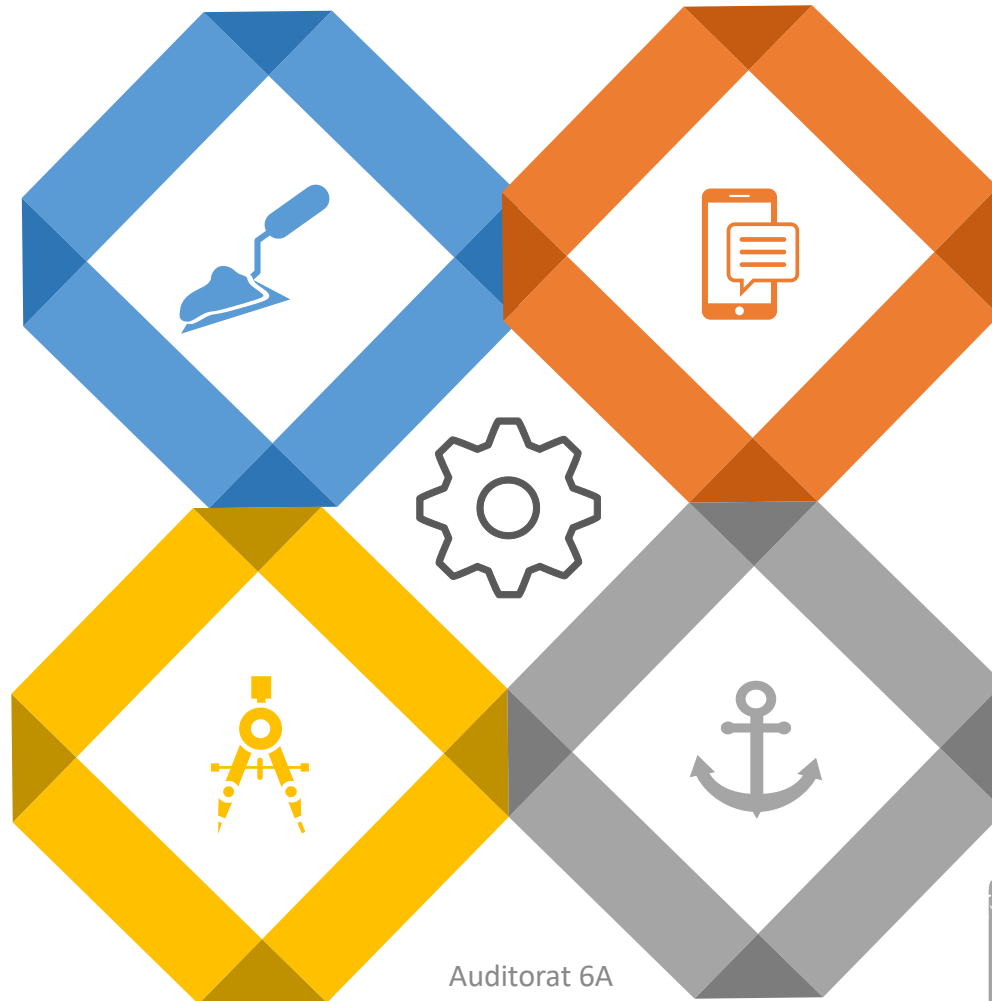




# Tujuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 20xx dengan mempertimbangkan

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

MKecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan yang diatur dalam SAP



Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)





## Sasaran Pemeriksaan

**Sasaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/L 20xx meliputi:**

- a. Akun dan asersi yang menjadi fokus pemeriksaan**
- b. Perubahan kebijakan dan Sistem Akuntansi**
- c. Pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan selama Tahun 20xx**





# Pemeriksaan LK BLU pada Kementerian Kesehatan



1

## UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 3)

↳ **Ayat 2:** Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

2

## PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU (Paragraf 6)

↳ LK BLU diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal, sehingga yang berwenang mengaudit atau menetapkan auditor bagi BLU adalah BPK.

3

## Peraturan BPK No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK

↳ Penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari dari luar BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara **ditetapkan** oleh **BPK**.

1. Perlu adanya Koordinasi Pemeriksaan LK BLU pada Kemenkes yang dilakukan oleh KAP
2. KAP harus memahami memastikan BLU menggunakan SAP

Bahwa BPK adalah auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan BLU berdasarkan SAP telah ditegaskan dalam:

1. Surat BPK RI nomor 3/S/IV-XV/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Kebijakan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan BLU. **KAP yang ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan atas LK BLU merupakan KAP yang terdaftar di BPK dan Pemeriksaan LK BLU oleh KAP harus memperhatikan jadwal pemeriksaan LKPP/LKKL, dan berkomunikasi dengan Tim Pemeriksaan LKPP/LKKL;**
2. Surat Menteri Keuangan kepada Anggota II BPK RI Nomor S-44/MK.05/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penegasan dan/atau Pengaturan Lebih Lanjut Terkait Penerapan PSAP 13 tentang Penyusunan LK BLU;
3. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb kepada Direktur BLU PKN STAN Nomor S-1153/PB.05/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Audit laporan Keuangan Satker Badan Layanan Umum. **Mekanisme penunjukan KAP seyogyanya ditetapkan oleh BPK RI untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh satker BLU**





# Issue pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

- a. Pertanggungjawaban Keuangan Satker
- b. Belanja (Pengadaan Barang dan Jasa)
- c. Ketidaktepatan Penggunaan Belanja COVID-19
- d. Transfer Masuk & Transfer Keluar Aset Tetap dan Persediaan, termasuk transaksi Resiprokal
- e. Insentif Perpajakan terkait Belanja Covid
- f. Ketertiban Penatausahaan BMN Hasil Pengadaan (termasuk hasil Pengadaan DSP BNPB, Hibah Langsung)
- g. Pengungkapan CALK Terkait COVID-19

**COVID-19**

**PANDEMIC**





# Issue Penanganan Covid 19 Bidang Kesehatan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2020

- Kegiatan testing, *tracing*, *treatment*, serta edukasi dan sosialisasi
- Dukungan fasilitas kesehatan dalam farmakovigilans
- Laboratorium belum sepenuhnya memenuhi standar *Bio Safety Level 2* (BSL-2) dan Pemantapan mutu laboratorium belum sepenuhnya memadai dan terdapat peralatan pengujian COVID-19 yang belum dikalibrasi
- verifikasi klaim tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19
- Penyaluran biaya manfaat oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan dalam rangka mempertahankan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan esensial selama masa pandemi COVID-19
- Penatausahaan kepesertaan dan bantuan iuran JKN oleh BPJS Kesehatan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan esensial (JKN)





# Issue Penanganan Covid 19 Bidang Kesehatan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2021

- Pelaksanaan Program Vaksinasi (Ketersediaan, Distribusi, Pelaksanaan, Sosialisasi dan Edukasi, vaksin kadaluarsa, vaksin Merah Putih, Penerbitan UEA)
- Insentif Nakes (terlambat, kurang, dan lebih bayar)
- Klaim Covid (terlambat, kesalahan, dispute klaim)
- Pengawasan Pre market dan Post market (vaksin, Obat dan Makanan)







# Pengembangan dan Pemanfaatan BDA



Portal BIDICS  
"Change and Knowledge Management"  
(<https://bidics.bpk.go.id>)

Dashboard BIDICS  
"Visualisasi dan Data Analytics"  
(<https://dashboard.bpk.go.id>)

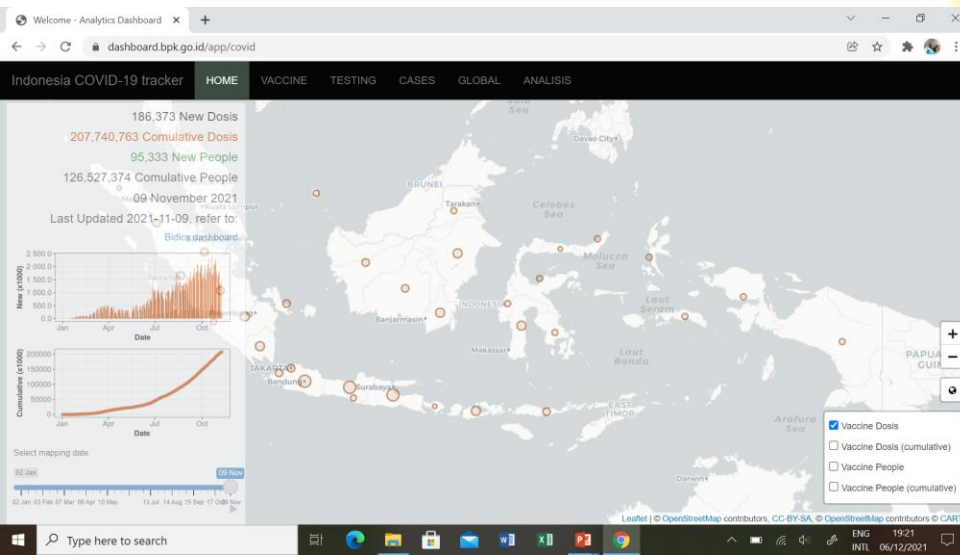
**COVID-19**  
**PANDEMIC**



# Pemanfaatan Big Data Analytics

- Risk Assessment
- Audit Quality
- Compliance Assurance

- Fraud Detection
- Planning Assistance
- Cost of Operation







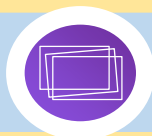
# Pengembangan BDA dalam Pemeriksaan BPK

AKSES *BIG DATA* DAN TABK

RENSTRA BPK

**2009**

Pengenalan Inisiatif e-audit (Sinergi IT Nasional)



Persiapan

**2010-2011**

Komitmen pemerintah pada inisiatif e-Audit



Inisialisasi

**2011-2019**

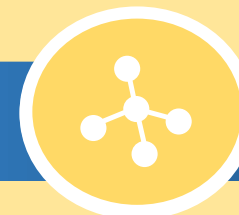
Pemeriksaan memanfaatkan *Big Data*



Implementasi

**2020-2024**

Pemeriksaan memanfaatkan *Big Data Analytics*



Pengembangan & Pemanfaatan

DATA CENTRIC



ANALYTIC CENTRIC

COVID-19

PANDEMIC

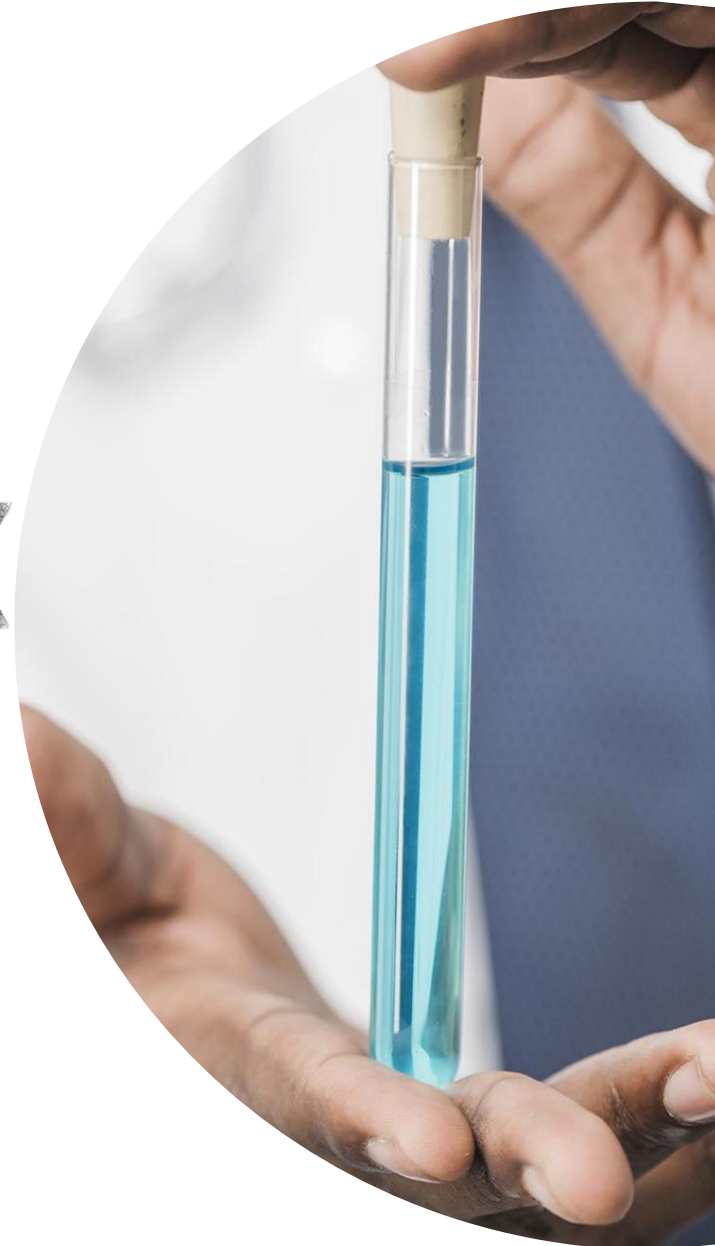


**GRACIAS**  
**ARIGATO**  
**SHUKURIA**

**THANK**  
**YOU**  
**BOLZIN**  
**MERCI**

**Terima kasih!**

**DANKSCHEEN**  
**BIYAN**  
**SHUKRIA**  
**TASHAKKUR ATU**  
**SUKSAMA**  
**EKHMET**  
**BANI**



**COVID-19**  
**PANDEMIC**